

# PELUANG PENATAAN AKSES BERDASARKAN POTENSI WILAYAH (STUDI KASUS DI KALURAHAN JATIMULYO) KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO)

## ***OPPORTUNITIES FOR ACCESS REFORM BASED ON REGIONAL POTENTIAL (CASE STUDY IN JATIMULYO VILLAGE) GIRIMULYO DISTRICT KULON PROGO REGENCY)***

**Sudibyanung<sup>1</sup>, Priyo Katon Prasetyo<sup>2</sup>, Arif Rahmadi<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta

e-mail: sudibyanung@stpn.ac.id

### **ABSTRAK**

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran di bidang agraria atau pertanahan adalah melaksanakan beberapa program yang salah satunya adalah reforma agraria. Secara substantif terdapat 2 (dua) hal pokok di dalamnya, yaitu penataan aset dan penataan akses. Terkait penataan akses, potensi di setiap wilayah yang bervariasi di Indonesia ikut menentukan strategi maupun pendekatan yang berbeda pula. Oleh sebab itu menjadi penting dan menarik untuk diteliti, potensi wilayah yang secara fisik geografis berada di wilayah perbukitan serta sektor pertanian bukan menjadi sektor unggulan secara ekonomi, yaitu Kalurahan Jatimulyo. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran potensi di dalam meningkatkan kemakmuran ataupun kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi wilayah, baik dari sisi fisik geografis maupun nonfisik geografis. Harapannya agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi pelaksanaan program reforma agraria, terutama penataan akses. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder berdasarkan hasil wawancara, observasi maupun studi dokumentasi yang bersumber dari warga masyarakat selaku pelaku ekonomi, pejabat kalurahan, dokumen yang ada di kalurahan, Kantor Pertanahan maupun Badan Pusat Statistik yang relevan dan terkait. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Jatimulyo mempunyai keunggulan pada sektor peternakan dan wisata alam. Sektor unggulan tersebut yang dapat digunakan sebagai *leader* dalam meningkatkan kesejahteraan dari sektor yang lain.

**Kata kunci :** penataan akses, potensi wilayah, kesejahteraan

### **ABSTRACT**

*In order to establish the prosperity, one of the Government's program in the agrarian or land sector is to implement several programs, which is the Agrarian Reform. Substantively, there are 2 (two) main things in it, namely asset reform and access reform. Regarding access reform, the regions potentiality in Indonesia will determine different strategies and approaches. Therefore, it is important and interesting to research the potential of areas where physically geographically they are located in hilly areas and the agricultural sector is not an economically superior sector, namely Jatimulyo Village. The aim of this research is to provide an overview of the potential for increasing prosperity or welfare of society based on regional conditions, both from a physical geographical and non-physical geographical perspective. The results expectation of this research is*

*can be used as a reference if in the future an agrarian reform program will be implemented, especially access reform. In this research, the approach used is a case study. The data collected is primary and secondary data based on the results of interviews, observations and documentation studies sourced from community members as economic actors, sub-district officials, documents in sub-districts, land offices and relevant and related central statistical bodies. The sampling technique uses purposive sampling. From the research of results, it can be concluded that with its physical geographical conditions in the form of hills, it turns out that Jatimulyo Village has advantages in the livestock and natural tourism sectors. This superior sector can be used as a leader in improving the welfare of other sectors.*

**Keywords :** access reform, regional potential, welfare

## I. PENDAHULUAN

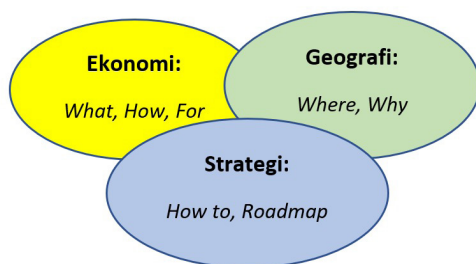
Sebagaimana dikutip dari Limbong (2012), selain sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan simbol dari kekayaan, prestise maupun kekuasaan atau kekuatan bagi para pihak, sehingga penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya perlu diatur demi terwujudnya tanah sebagai sumber kemakmuran bagi seluruh bangsa dan negara. Berbagai upaya pengaturan pertanahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah selaku kepanjangan tangan dari negara selalu berusaha mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Salah satu upaya nyata terkait pengaturan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah yang adil demi mewujudkan pemerataan adalah menggiatkan program reforma agraria. Program tersebut tentu butuh payung hukum, oleh sebab itu kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Namun setelah kurang lebih berjalan 5 tahun dan ternyata program belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan maka kemudian pemerintah mencabut peraturan tersebut dan menggantinya dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Sebenarnya jika dicermati kedua regulasi di atas, secara filosofis ataupun substansi pokok tidaklah terlalu banyak perubahan, yaitu pembangunan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi maupun kemiskinan. Tujuan tersebut dapat diwujudkan jika reforma agraria dijalankan secara serius, yaitu pertama melalui program penataan aset dan kedua adalah penataan akses, yang tentu semuanya bersumber dari tanah. Hal ini sejalan dengan pendapat Fatimah (2015) yang menyatakan bahwa reforma agraria merupakan salah satu alat untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, mengingat akses terhadap tanah merupakan sesuatu yang bersifat fundamental guna pembangunan sosial,

ekonomi, termasuk mengurangi kemiskinan, dan juga kelestarian lingkungan hidup.

Upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reforma agraria ini tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah dan sederhana. Reforma agraria ini tidak hanya berkaitan dengan kelembagaan dan ekonomi semata, namun mungkin juga berkaitan dengan faktor yang bersifat fisik wilayah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, lebih banyak temuan yang mengaitkan antara problematika pelaksanaan reforma agraria dengan kesejahteraan hanya dari sisi atau faktor kelembagaan saja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sutaryono et al. (2019), yang menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria adalah permasalahan yuridis, permasalahan kelembagaan dan permasalahan sumber daya manusia. Penelitian dengan tema reforma agraria khususnya terkait dengan penataan akses yang dilakukan oleh Ramadhani et al. (2023) menyebutkan bahwa salah satu urgensi penataan akses permodalan ditentukan oleh beberapa hal, yang mana yang cukup penting adalah pertimbangan bahwa perekonomian dalam suatu lingkungan masyarakat sangat ditentukan oleh kegiatan yang selama ini telah dilakukan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2022), yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kelemahan di dalam menerapkan penataan akses di masyarakat sebagai pelaku adalah belum siapnya masyarakat terkait dengan media sosial sebagai alat atau *tools* yang digunakan sebagai media pemasarannya, sehingga apa yang sudah dilakukan belum optimal hasilnya. Permasalahan terkait penataan akses juga menjadi simpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2019), yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa asas keadilan dan pembaruan agraria melalui penataan

akses ke sumber-sumber ekonomi, seperti: modal, usaha, produksi dan pasar belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurang serta lambatnya respon dari pihak-pihak terkait, yaitu instansi, organisasi pemerintah daerah serta perbankan, sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Berbeda halnya dengan Utomo (2021), yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tidak mudah dalam menata struktur tanah dengan kondisi wilayah Indonesia yang beragam dengan beberapa aspek yaitu adat istiadat, sosial dan struktur tanah itu sendiri. Selain itu diperlukan juga komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkannya, baik dari sisi pelaksananya maupun subyek yang bersangkutan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana strategi yang harus dilaksanakan, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, terukur, sistematis dan mudah diterapkan di lapangan. Temuan penelitian tersebut menjadi pembeda dengan penelitian yang lain ketika unsur fisik ternyata menjadi salah satu temuan permasalahan di dalam pelaksanaan reforma agraria. Oleh sebab itu maka perlu mencermati masalah di dalam pelaksanaan reforma agraria dari pendekatan yang terkait dan relevan, yaitu unsur fisik dan nonfisik.

Jika mengaitkan pendekatan dengan keilmuan, minimal terdapat 2 (dua) pendekatan keilmuan yang berkaitan dengan konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat ini. Kuncoro (2013), mengilustrasikan sebuah irisan keilmuan dan strategi dalam mencapai kesejahteraan tersebut sebagaimana Gambar 1.



Sumber: Kuncoro (2013)

**Gambar 1** Irisan ilmu ekonomi, geografi dan strategi

Dari ilustrasi di atas jika dikaitkan dengan kesejahteraan maka perlu jawaban atas pertanyaan mendasar yaitu hubungan antara irisan keilmuan di atas, *pertama* bahwa secara ekonomi untuk apa

kesejahteraan itu diwujudkan, *kedua*, mengapa kesejahteraan itu diperlukan dan *ketiga*, untuk siapa kesejahteraan itu diwujudkan. Ketiga pertanyaan tersebut tentu berkaitan atau beririsan pula dengan pendekatan atau keilmuan yang lain, yang dalam hal ini geografi atau kongkretnya fisik wilayah. Pertanyaan yang muncul adalah di manakah kesejahteraan tersebut akan diwujudkan serta mengapa harus di lokasi tersebut? Untuk itu kemudian diperlukanlah suatu strategi, yang tepat dan sesuai untuk dilaksanakan berdasarkan jawaban pertanyaan di atas. Inilah yang dimaksud dengan irisan yang saling kait mengait antara ekonomi, geografi serta strategi. Dengan demikian maka sesuai dengan tujuan reforma agraria, yang harapannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat, juga tidak dapat dilepaskan dari potensi-potensi yang ada, yang dalam hal ini berupa potensi fisik geografis wilayah maupun potensi nonfisik.

Salah satu lokasi yang penting dan menarik menjadi lokasi penelitian dengan tema reforma agraria, khususnya terkait penataan akses adalah di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Alasan pemilihan lokasi ini adalah mencermati kondisi yang secara fisik geografis wilayah berupa perbukitan serta pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih difokuskan ke arah pemanfaatan sumber daya alam dalam wujud usaha berupa pengelolaan destinasi wisata, konservasi alam, serta minim usaha di bidang pertanian lahan basah, sehingga akan memunculkan beberapa pertanyaan yaitu bagaimana dengan potensi yang ada dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan kondisi fisik geografis wilayah Kalurahan Jatimulyo yang kurang menguntungkan tersebut, dapatkah dikembangkan potensinya melalui program reforma agraria, termasuk di dalamnya penataan akses? Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan cara mengukur lebih mendalam, khususnya terkait dengan potensi yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran faktual atas potensi-potensi yang ada di suatu wilayah, yang dalam hal ini adalah potensi Kalurahan Jatimulyo yang diukur berdasarkan penghitungan secara ekonomi sehingga dapat diketahui peluang yang dapat dikembangkan dalam rangka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kemudian hari. Tentu saja harapannya

adalah hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber referensi terkait dengan kebijakan dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Jatimulyo.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studikusus, dengan menggunakan lingkup unit analisis berupa kalurahan atau desa. Adapun terkait dengan jenis serta sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas beberapa sumber. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat secara terbuka dan tidak terstruktur yang sifatnya mendukung serta relevan dengan fokus penelitian, di antaranya data pendapatan masyarakat yang berasal dari usaha rumah tangga maupun data pendapatan masyarakat yang berasal dari pengelolaan usaha wisata serta budaya. Untuk data sekunder diperoleh dari hasil pengumpulan data berupa dokumen yang ada di kantor kalurahan setempat maupun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo, seperti data kependudukan atau demografi, data sumber anggaran kegiatan kalurahan maupun data destinasi wisata. Selain itu diperlukan juga data terkait pertanahan baik data fisik maupun data yuridis yang bersumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan purposif. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun di dalam tahapan dalam melakukan analisis data adalah

1. mengumpulkan data baik tekstual maupun spasial;
2. mengidentifikasi dan memverifikasi data;
3. mengklasifikasikan data;
4. mensinergikan atau mengkaitkan antardata yang sesuai dan relevan, baik antara data yang berkarakteristik tekstual dan tekstual, tekstual dan spasial, maupun spasial dan spasial;
5. menterjemahkan dan memberikan simpulan.

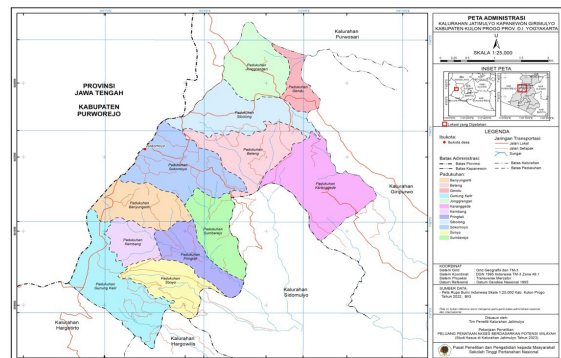
Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep penting terkait dengan batasan operasional, seperti misal yang dimaksudkan dengan peluang penataan akses lebih dimaknai sebagai usaha-usaha yang

terkait dengan besaran peluang di dalam membuka akses ekonomi dalam wujud pemanfaatan sumber daya fisik dan nonfisik. Untuk potensi wilayah lebih dimaknai sebagai kemampuan atau kekuatan dari sesuatu yang sudah ada maupun belum ada, akan tetapi belum atau sudah mulai dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal. Fokus potensi wilayah di dalam penelitian ini dapat berasal dari potensi yang bersifat fisik maupun nonfisik. Potensi fisik lebih difokuskan pada sumber daya alam yang ada di wilayah penelitian, seperti destinasi wisata alam maupun pengelolaan alam seperti konservasi, sedangkan potensi nonfisik yang dimaksud seperti misal potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta usaha peternakan. Tentu saja mengingat pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi maka di dalam mengukur konsep yang telah diuraikan di atas menggunakan ukuran derajat moneter.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mengenal Kalurahan Jatimulyo

Secara administratif, Kalurahan Jatimulyo merupakan salah satu dari kalurahan di wilayah Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dengan total luas wilayah sebesar 1.629,00 ha dan terbagi menjadi 12 (dua belas) padukuhan. Secara spasial, pembagian wilayah administratif pedukuhan di wilayah Kalurahan Jatimulyo dapat dilihat pada Gambar 2.

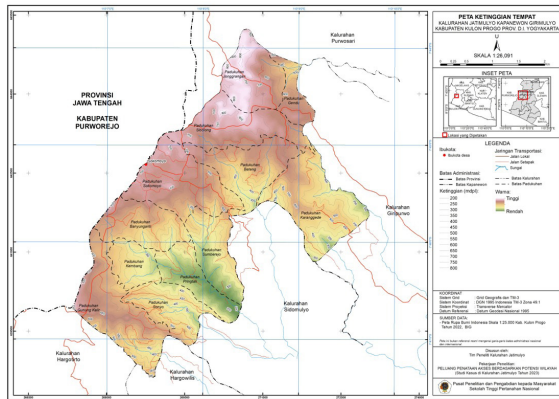


Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, data dimodifikasi, 2023

**Gambar 2** Peta Administratif Kalurahan Jatimulyo.

Dari seluruh padukuhan yang ada tersebut, secara fisik hampir semua wilayahnya merupakan wilayah perbukitan, yang biasa dikenal dengan nama

Perbukitan Menoreh. Selain itu dengan karakteristik ketinggian yang bervariasi mulai dari ketinggian 200 mdpl hingga 800 mdpl serta luas wilayah yang hanya 1.629 ha maka patut diduga wilayah Kalurahan Jatimulyo secara fisik geografis bukanlah daerah yang datar namun cenderung berlereng. Secara spasial, gambaran ketinggian di wilayah Kalurahan Jatimulyo dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, data dimodifikasi, 2023

**Gambar 3** Peta Ketinggian Wilayah Kalurahan Jatimulyo.

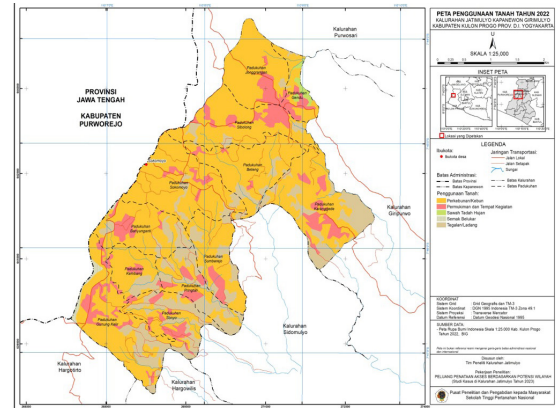
Untuk penggunaan tanah di Kalurahan Jatimulyo, relatif bervariasi mulai dari ladang atau tegalan, permukiman, destinasi wisata maupun ada juga persawahan meskipun luasannya relatif kecil. Apabila diamati secara sederhana terdapat kecenderungan bahwa penggunaan tanah di lokasi didominasi atau lebih banyak berwujud perkebunan dan ladang. Artinya untuk pertanian lahan basah cukup minim luasnya. Untuk mengetahui luasan masing-masing penggunaan tanah di Kalurahan Jatimulyo dapat kita lihat sebagaimana Tabel 1.

**Tabel 1** Penggunaan Tanah di Kalurahan Jatimulyo

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	%
1	Perkebunan/ Kebun	996,46	61,17
2	Permukiman dan Aset Publik	345,68	21,22
3	Sawah Tadah Hujan	7,50	0,46
4	Semak Belukar	7,16	0,44
5	Tegalan/ Ladang	272,20	16,71
Jumlah		1.629,00	100,00

Sumber: Analisis Peta Penggunaan Tanah Kalurahan Jatimulyo, 2023

Berdasarkan data sebagaimana pada Tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50 % penggunaan tanah di Kalurahan Jatimulyo adalah perkebunan. Untuk mengamati secara spasial, variasi penggunaan tanah di Kalurahan Jatimulyo dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, data dimodifikasi, 2023

**Gambar 4** Peta Penggunaan Tanah Kalurahan Jatimulyo.

Selain aspek fisik sebagaimana telah disajikan di atas, jika mengacu pada aspek nonfisik yang salah satunya mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 364/ KEP/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya, Tahun 2020 Kalurahan Jatimulyo telah ditetapkan sebagai salah satu desa mandiri budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beberapa syarat agar dapat diberikan atau ditetapkan sebagai desa mandiri budaya antara lain jika desa tersebut telah mempunyai 4 (empat) pilar pokok dan keempat pilar tersebut telah berjalan secara riil sebagai berikut.

1. Desa/kalurahan budaya yaitu desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya.
2. Desa/kalurahan wisata yaitu terdapat kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.



3. Desa/kalurahan prima yaitu desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
4. Desa/kalurahan *preneur* yaitu desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, meningkatkan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.

Dalam implementasinya, untuk menjaga keberlangsungan 4 pilar di atas tentu membutuhkan anggaran atau dana sebagai pendukung kegiatan. Terdapat beberapa sumber dana atau pendapatan yang diperoleh oleh Kalurahan Jatimulyo, antara lain sebagai berikut.

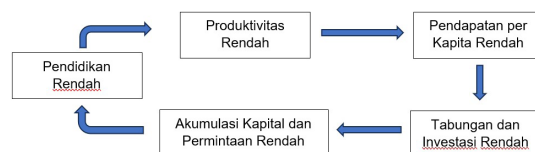
1. Dana desa rata-rata sebesar 2 milyar rupiah per tahun.
2. Dana keistimewaan rata-rata dalam 3 tahun terakhir sebesar 1 milyar rupiah.
3. Pendapatan asli desa (PAD) berkisar antara 50 juta hingga 100 juta rupiah per tahun.
4. Pendapatan lain-lain atau pendapatan yang bersifat temporer, yang terdiri:
  - a. program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pariwisata sebesar Rp75.000.000,- hingga Rp100.000.000,-;
  - b. bantuan untuk pengelolaan destinasi wisata Goa Kiskendo untuk warga sebanyak 2 orang yang dibayar rata-rata per bulan Rp1.900.000,-;
  - c. bantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo untuk masing-masing padukuhan sebesar Rp11.000.000,- namun bantuan ini hanya diberikan biasanya ketika terdapat perayaan kesenian yang melibatkan seluruh padukuhan di wilayah Kalurahan Jatimulyo;
  - d. ada berwujud barang/pembangunan, seperti halnya bantuan dari PLN yang berwujud mushola dan pendopo di destinasi ekowisata Sungai Mudal.

## B. Penyajian dan Analisis Potensi Penduduk

Terkait dengan potensi penduduk di Kalurahan Jatimulyo, sebenarnya dapat dicermati dari beberapa aspek yang relevan dan terkait. Dari beberapa aspek tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Potensi Penduduk Berdasarkan Keterkaitan antara Tingkat Pendidikan dengan Standar Ketenagakerjaan

Potensi penduduk dalam kaitannya dengan pengembangan usaha produksi ekonomi, secara teoritis relevan dapat dikaitkan dengan teori lingkaran setan kemiskinan. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa ketika pendidikan rendah maka pengetahuannya juga rendah, sehingga produksi yang dihasilkannya pun rendah dan hal ini mengakibatkan pendapatannya pun rendah. Demikian pula ketika pendapatan rendah maka yang akan terjadi adalah tabungannya rendah, sehingga modalnya pun akan menjadi rendah, dan implikasi yang kemudian timbul dari rendahnya modal ini adalah tingkat produktivitas yang rendah. Berikutnya dengan produktivitas yang rendah maka otomatis konsumsi untuk pemenuhan sarana dan prasarana kehidupan serta kondisi gizi menjadi rendah pula, dan akhirnya mengakibatkan kinerja rendah sehingga berakibat kembali pada produktivitas yang dihasilkan juga rendah. Jika diilustrasikan ke dalam sebuah gambar, secara sederhana lingkaran setan kemiskinan dapat dicermati sebagaimana Gambar 5.



Sumber: Wijaya (2000)

**Gambar 5** Lingkaran Setan Kemiskinan

Dari Gambar 5, jika lebih disederhanakan terdapat 2 (dua) komponen pokok yang sangat menentukan di dalam mewujudkan sebuah potensi, utamanya potensi yang terkait dengan usaha ekonomi, yaitu keterkaitan antara pendidikan dan produktivitas. Dalam hal ini produktivitas relevan dan dapat dikaitkan dengan standar ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Standar yang berlaku di Indonesia ini mengaitkan

atau mensetarakan antara tingkat pendidikan atau tingkat lulusan seseorang dengan tingkat kemampuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ukuran-ukuran ini sering disebut dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012. Penyetaraan-penyetaraan jenjang kualifikasi yang diatur sebagaimana peraturan di atas, jika dirinci maka jenjang pengukurannya sebagaimana Tabel 2.

**Tabel 2** Jenjang Kualifikasi KKNI di Indonesia

No	Lulusan Pendidikan	Jenjang
1	Pendidikan Dasar (SD)	1
2	Pendidikan Menengah (SMP-SMA)	2
3	Diploma I	3
4	Diploma II	4
5	Diploma III	5
6	D.IV atau Sarjana	6
7	Pendidikan Profesi	7 atau 8
8	Magister Terapan atau Magister	8
9	Pendidikan Spesialis	8 atau 9
10	Doktor atau Doktor Terapan	9

Sumber: Pasal 5 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012

Adapun berikutnya, berdasarkan jenjang sebagaimana tabel di atas maka jenjang-jenjang tersebut perlu disetarakan sesuai dengan capaian pembelajaran guna menetapkan tingkatan ataupun level sesuai dengan pekerjaan orang yang bersangkutan dengan gradasi/tingkatan sebagaimana Tabel 3.

**Tabel 3** Penyetaraan Jenjang berdasarkan KKNI

No.	Jenjang	Tingkatan/Level
1	1, 2, dan 3	Operator
2	4, 5, dan 6	Teknisi/Analisis
3	7, 8, dan 9	Ahli

Sumber: Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012

Standar pengukuran pada Tabel 2 dan 3 dapat dan perlu digunakan sebagai acuan di dalam melihat bagaimana kondisi riil sumber daya manusia yang ada di Kalurahan Jatimulyo dikaitkan dengan level maupun jenjang yang ada di dalam KKNI. Untuk itu akan disajikan data mengenai tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Jatimulyo guna dikaitkan dengan KKNI yang berlaku di Indonesia sebagaimana Tabel 4.

**Tabel 4** Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Jatimulyo dikaitkan dengan SKKNI

No.	Pendidikan/ Lulusan	Jumlah	%	Jenjang	Level
1	Sekolah Dasar	3.979	54,17	1	Operator
2	SMP – SMA	3.110	42,34	2	Operator
3	Tamat D.III	52	0,70	5	Teknisi/ Analisis
4	Strata 1	195	2,65	6	Teknisi/ Analisis
5	Strata 2	6	0,14	8	Ahli
Jumlah		7.344	100		

Sumber: Analisis data sekunder hasil Modifikasi data Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jatimulyo dengan KKNI, 2023.

Jika mengacu data pada Tabel 4, maka dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia di Kalurahan Jatimulyo mayoritas berada pada jenjang 1 hingga 2 atau dalam kategori sebutan level operator. Angka di dalam tabel di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Jatimulyo pada jenjang 1 dan 2 yang disebut sebagai level operator mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu 7.089 orang atau sebesar 96,51% dari total jumlah penduduknya. Dengan kondisi seperti itu maka dapat dimaknai bahwa penduduk Kalurahan Jatimulyo bukan berada pada level analisis atau bahkan ahli.

2. Potensi Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Berbeda halnya jika dianalisis berdasarkan hasil pengamatan dari sisi yang lain, yaitu usia produktif. Jika usaha-usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian tersebut dicermati dari sudut pandang usia produktif penduduk sangat mungkin peluang itu terbuka lebar. Sebagai contoh jika kita menggunakan acuan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam pengukuran usia produktif sebagaimana skala yang digunakan, maka kategorisasi dibagi menjadi beberapa kategori sebagaimana Tabel 5.

**Tabel 5** Usia Produktif Penduduk

No.	Usia	Kategori
1	> 0 – 14	Belum Produktif
2	15 – 65	Produktif
3	> 65	Tidak Produktif

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Mengacu pada skala pengukuran usia Tabel 5 dalam kaitannya dengan produktifitas penduduk, perlu disandingkan data riil yang ada dengan skala

pengukuran produktifitas yang bersumber dari BPS. Berdasarkan data riil penduduk dari sisi usia di Kalurahan Jatimulyo dan disandingkan dengan skala pengukuran produktifitas penduduk secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6** Komposisi Usia Penduduk Kalurahan Jatimulyo dengan Skala Pengukuran Produktifitas

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah	%	Kategori
1	> 0 – 14	1.340	18,24	Belum Produktif
2	15 – 65	4.928	67,11	Produktif
3	> 65	1.076	14,65	Tidak Produktif
Jumlah		7.344	100	

Sumber: Analisis data Sekunder Hasil Modifikasi Data Komposisi Penduduk Kalurahan Jatimulyo dengan Skala Ukuran Produktifitas Tenaga Kerja BPS, 2023.

Dari tabel komposisi kelompok umur menunjukkan bahwa berdasarkan komposisi usia penduduk dan disandingkan dengan kategori pengukuran produktifitas tenaga kerja dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Jatimulyo berusia produktif, sehingga besar peluang di dalam pengembangan usaha. Hal tersebut dapat dicermati dari persentase usia produktif di mana lebih dari 50 % atau tepatnya 67,11 % penduduk Kalurahan Jatimulyo merupakan penduduk usia produktif, sedangkan sebesar 32,89 % merupakan penduduk dengan usia belum dan tidak produktif. Hal ini semakin dikuatkan dengan hasil pengukuran rasio beban tanggungan yang jika dikalkulasikan mempunyai angka sebesar  $= (1.340+1.076) : 4.928 \times 100 = 49,02$  yang maknanya setiap 100 orang usia produktif maka mempunyai tanggungan sebesar 49 orang tidak/belum produktif. Atau yang lebih sederhana setiap 2 orang produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 1 orang tidak/belum produktif. Trisaningsih (2016) menyatakan bahwa rasio beban tanggungan atau rasio ketergantungan ini merupakan salah satu pengukuran dari perspektif demografi yang bermanfaat untuk studi di bidang ekonomi.

### C. Analisis Potensi Usaha yang berkarakteristik Nonfisik Geografis

Pada dasarnya manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu memanfaatkan sumber

daya yang ada. Berdasarkan pertimbangan dari beberapa aspek maupun kondisi ekonomi wilayah Kalurahan Jatimulyo, maka kemudian terdapat beberapa jenis usaha ekonomi yang hingga saat ini terus berjalan yakni sebagai berikut.

#### 1. Potensi Peternakan

Sektor peternakan yang paling menjanjikan atau mayoritas dibudidayakan di Kalurahan Jatimulyo adalah peternakan kambing peranakan etawa. Menurut informasi dari beberapa narasumber, diantaranya Lurah Jatimulyo serta pejabat Jagabaya, tidak kurang dari 80% kepala keluarga (KK) di Kalurahan Jatimulyo memelihara kambing tersebut. Secara rinci disebutkan bahwa dari masing-masing kepala keluarga tersebut, rata-rata mereka memelihara 4 ekor kambing peranakan etawa. 4 (empat) ekor tersebut biasanya terdiri atas 1 jantan, 2 betina dan 1 anakan. Jika rincian di atas dikalkulasi dengan jumlah kepala keluarga yang ada di Kalurahan Jatimulyo secara total, yaitu sebanyak 2.571 KK, maka 80% nya atau sebanyak 2.056 KK memelihara kambing peranakan etawa, sehingga jika dikalikan dengan rata-rata kepemilikan kambing per KK sebanyak 4 ekor, akan menghasilkan jumlah total kambing peranakan etawa sebanyak 8.224 ekor kambing.

Dari kambing peranakan etawa betina dewasa, dalam sehari rata-rata mampu menghasilkan produk berupa susu sebanyak 2 hingga 3 liter. Dengan demikian jika dalam 1 KK terdapat 2 ekor kambing peranakan etawa betina dewasa, maka dengan menggunakan asumsi produksi terendah akan menghasilkan minimal 4 liter susu per KK. Apabila asumsi menggunakan 4 liter produk susu per KK, dan kemudian dikalikan dengan jumlah KK yang memelihara kambing tersebut, maka dapat dikalkulasikan 4 liter dikalikan 2.056 KK, hasilnya adalah 8.224 liter susu per hari mampu diproduksi dari wilayah Kalurahan Jatimulyo. Selanjutnya jika menggunakan penghitungan ekonomis sederhana, bahwa harga susu mentah kambing peranakan etawa per liter berkisar antara Rp20.000,- hingga Rp25.000,- maka akan diperoleh hasil yang cukup besar. Jika misal kita gunakan asumsi per liter dengan harga terendah, yaitu Rp20.000,- maka dalam 1 (satu) KK per hari akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp80.000,-. Pendapatan



sebesar Rp80.000,- ini relatif dapat dikatakan bersih, karena untuk biaya produksi bagi peternak, yaitu berupa pakan ternak yang wujudnya rumput-

rumpun, diambil dari halaman sekitar rumah dan tegalan yang dimilikinya. Untuk lebih memudahkan pemahaman dari uraian di atas maka dapat dilihat Tabel 7.

**Tabel 7** Tabel Produktifitas Susu Kambing Peranakan Etawa

Kepala Keluarga (KK)	Rata-rata jumlah Kambing per KK	Produksi susu mentah rata-rata terendah (liter/kambing)	Harga rata-rata terendah (Rp/liter)	Total pendapatan per KK/hari (Rp)	Total pendapatan dalam wilayah kalurahan/hari (Rp)
2.056	Jantan	1	0	-	-
	Betina	2	2	20.000	80.000
	Anakan	1	0	-	-

Sumber: Analisis Data Primer, 2023.

Hasil penghitungan di atas bisa juga diakumulasikan dalam satuan waktu tertentu, misalkan kita mengasumsikan dari sudut pandang keluarga/KK per bulan, maka setiap KK akan berproduksi sebesar: 4 liter X Rp20.000,- X 30 hari atau sebesar Rp2.400.000,- per bulan. Jika angka tersebut disandingkan dengan besaran upah

minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun 2023 yang besarnya adalah Rp2.050.447,15 maka dapat disimpulkan bahwa 80% KK di Kalurahan Jatimulyo berpendapatan di atas UMK yang berlaku. Agar lebih jelas perbandingan hasil usaha peternakan berada di atas dengan UMK yang berlaku pada tahun 2023 maka dapat dilihat Tabel 8.

**Tabel 8** Perbandingan Produktifitas Susu dengan UMK Tahun 2023

Jumlah Produksi rata-rata susu per KK (liter)	Harga produksi rata-rata terendah (Rp)	Estimasi satuan waktu (hari)	Total pendapatan KK/bulan (Rp)	Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kulon Progo Tahun 2023 (Rp)
4	20.000,-	30	2.400.000,-	2.050.447,15

Sumber: Analisis Data Primer, 2023.

## 2. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Untuk pertanian tanaman padi di Kalurahan Jatimulyo dapat dikatakan tidak begitu berperan dalam mendukung sektor perekonomian, apalagi dari sisi produksi. Hal ini karena dominasi luas penggunaan tanah pertanian untuk padi hanya berkisar pada luasan 7,5 ha atau 0,46% dari luas total wilayah (lihat Tabel 1). Karakteristik dari areal pertanian inipun tidak bisa dikatakan pertanian beririgasi teknis, karena karakteristik pertanian di lokasi adalah sawah tadah hujan.

Untuk usaha di bidang perkebunan yang ada di Kalurahan Jatimulyo belum dimanfaatkan secara optimal. Terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan yang ditanam warga Kalurahan Jatimulyo, seperti kopi, kakao, vanili, pisang, salak, dan beberapa jenis tanaman buah lainnya. Menurut beberapa informan, pemanfaatan fungsi kebun lebih diorientasikan berada di sekitar rumah, dengan

pertimbangan antara lain: jumlah yang ditanam tidak begitu banyak sehingga tidak perlu tempat yang luas, hasil produksi selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga/pribadi sisanya juga dijual untuk menambah pendapatan, dengan menanam beberapa jenis pohon di sekitar tempat tinggal pengelolaan dan pengawasannya lebih mudah, dan terakhir dengan ditanamnya beberapa jenis tanaman maka perputaran atau rotasi musim dari masing-masing jenis tanaman dapat berjalan sepanjang tahun secara bergantian sehingga produksinya pun terus berjalan sepanjang tahun.

Untuk pemanfaatan tanah yang lain seperti perladangan, ditanami beberapa jenis tanaman produksi seperti jagung, kacang, kedelai serta rumput pakan ternak. Produksi tanaman yang ada di ladang inipun mempunyai orientasi yang sama dengan tanaman jenis buah-buahan, yaitu untuk menambah penghasilan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga melalui perputaran musin tanam.

### 3. Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rumah Tangga

Kalurahan Jatimulyo saat ini memang sudah ada dan mulai diberdayakan usaha yang bersifat mikro dan kecil, namun masih dalam lingkup pemasaran lokal saja. Hasil produksi hanya cenderung dipasarkan ketika ada perayaan budaya saja. Dengan demikian produk-produk tersebut dapat dikatakan belum dikenal oleh masyarakat luas. Level pemasaran secara umum hanya pada level festival UMKM untuk pasar ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Sebagai desa *preneur* ada beberapa jenis produk yang dihasilkan dan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berikut.

#### a. Kerajinan

- 1) teko minuman dari batok kelapa
- 2) cangkir minum dari batok kelapa
- 3) cobek dari batang kelapa
- 4) pot tanaman dari serabut kelapa

#### b. Produk kebutuhan rumah tangga

- 1) pembersih lantai
- 2) lilin
- 3) pewangi ruangan
- 4) sabun cuci

#### c. Produk makanan

- 1) dawet sambel
- 2) sari salak
- 3) madu lebah klanceng
- 4) kopi sulingan
- 5) gula aren sulingan
- 6) kripik pisang
- 7) kripik tales
- 8) gula semut
- 9) minyak kelapa
- 10) geblek
- 11) tempe sengek

Menurut beberapa informan di Kalurahan Jatimulyo, ada beberapa masalah terkait dengan UMKM ini. Untuk UMKM yang fokus pada sektor makanan, masalah yang terjadi adalah sulitnya memperoleh sertifikat PIRT (produk industri rumah tangga), sedangkan untuk UMKM dengan fokus

produksi sektor kerajinan dan rumah tangga, permasalahan yang dihadapi secara garis besar ada 2 (dua), yaitu pertama pemasaran belum optimal, dalam arti pemasaran produk belum menyentuh luar wilayah dan yang kedua adalah bahan baku yang tidak tersedia di lokasi.

## D. Analisis Potensi Usaha yang berkarakteristik Fisik Geografis

Kalurahan Jatimulyo, yang wilayahnya merupakan perbukitan serta wujud fisik didominasi tumbuhan hutan, sangat cocok dimanfaatkan untuk beberapa usaha yang mengarah pada wisata alam. Adapun usaha yang telah dikembangkan di Kalurahan Jatimulyo antara lain sebagai berikut.

### 1. Potensi Usaha Konservasi/Pelestarian Burung

Sejak lahirnya Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Kalurahan Jatimulyo mempunyai "pijakan hukum" terkait dengan pelestarian alam. Pada saat itu ditujukan untuk sumber daya alam berupa keberadaan sumber mata air dan tumbuh-tumbuhan, namun kemudian berkembang dan mendapat respon positif baik dari dalam maupun luar kalurahan, yaitu terkait pelestarian jenis-jenis burung, sehingga akhirnya Kalurahan Jatimulyo dikenal sebagai "desa ramah burung". Kegiatan pelestarian burung ini mulai berkembang sejak munculnya seorang "*leader*" yang berperan aktif di dalamnya. Beliau biasa dikenal dengan nama Mas Kelik, dan saat ini yang bersangkutan juga memegang posisi sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Paksi. Dari hasil wawancara dengan yang bersangkutan dapat diketahui terdapat 2 (dua) hal pokok yang cukup penting terkait dengan pelestarian burung di Kalurahan Jatimulyo ini. Yang pertama adalah menjaga fungsi ekologis dan kedua adalah menghasilkan finansial, meskipun tidak secara langsung. Yang dimaksud dengan menghasilkan finansial ini adalah dengan dilaksanakannya pelestarian, perlindungan, pengembangan jenis spesies burung maka akan menarik pihak-pihak pemerhati lingkungan untuk menyokong, mendanai bahkan siap menjadi donator di dalamnya. Berdasarkan pengumpulan data lapang, ada beberapa tokoh yang sudah "pesan tempat" untuk dapat menjadi donator pelestarian burung ini, sebut saja Erick Thohir (Menteri BUMN), Prof. Dr. Ova Emilia (Rektor UGM), Gusti Yudho (Kraton

Jogja) dan beberapa tokoh lain serta masyarakat simpatisan. Terdapat beberapa paket adopsi burung yang ditawarkan oleh KTH Wana Paksi, seperti

- a. Paket I (seharga Rp1.500.000,-) untuk jenis burung:
  - 1) sulingan
  - 2) cucak jenggut
  - 3) madu pengantin
  - 4) pelatuk besi
  - 5) madu belukar
  - 6) prenjak jawa
- b. Paket II (seharga Rp1.000.000,-) Untuk semua jenis burung kutilang
- c. Paket III (seharga Rp800.000,-) untuk jenis burung:
  - 1) madu jawa
  - 2) prenjak coklat
  - 3) betet kelabu
  - 4) jekakak jawa

Dari besaran nilai paket adopsi yang telah disebutkan di atas, pembagian secara finansial terkait dengan relawan adalah sebagai berikut.

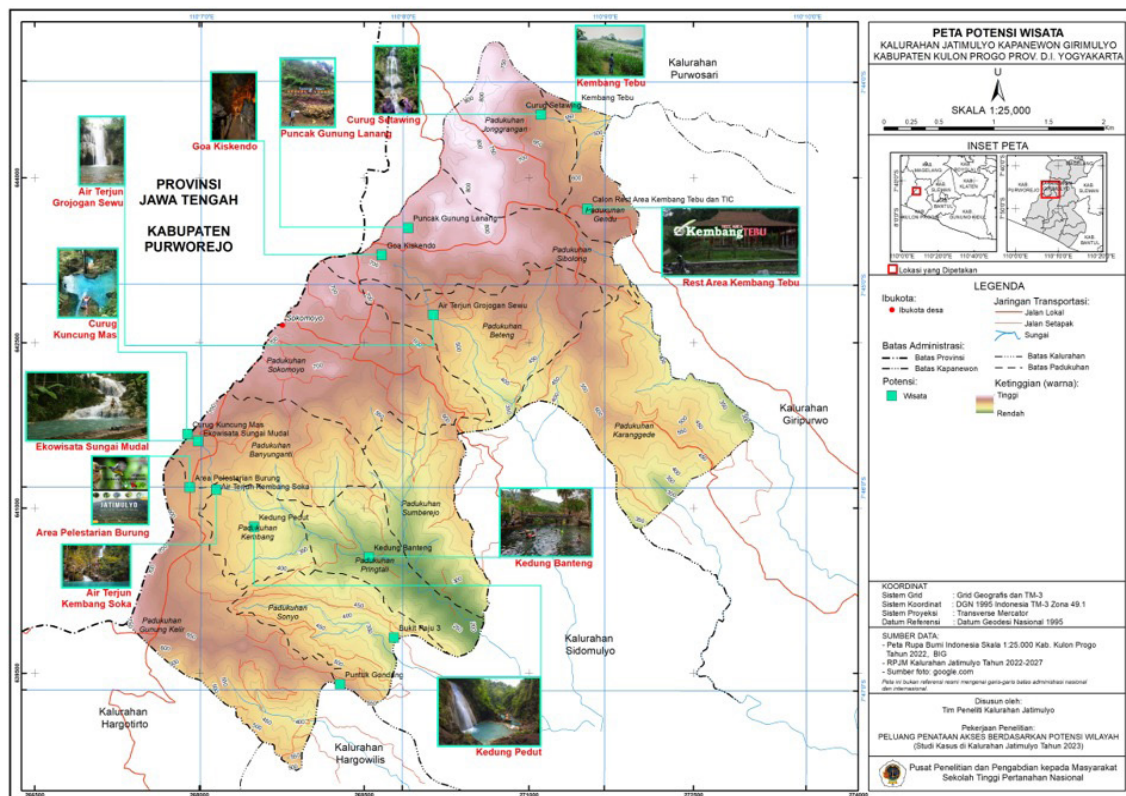
- d. Pencari sekaligus penemu sarang = Rp175.000,-
- e. Pemilik lahan lokasi burung = Rp125.000,-
- f. Operasional/pelaku pemeliharaan dari telur sampai menetas = Rp300.000,-
- g. Kas RT dan KTH = Rp50.000,- (@ Rp25.000,-)
- h. Pembuatan *hyding* (jika diperlukan) = Rp100.000,-
- i. Total = Rp750.000,-
- j. Sisa = rupiah masuk kas konservasi kalurahan

Program pelestarian spesies burung di Kalurahan Jatimulyo ini dirasa cukup berhasil. Dari jumlah sekitar 80 spesies jenis burung di tahun 2016, berkembang menjadi kurang lebih sekitar 110 spesies jenis burung di akhir tahun 2022. Namun demikian jika dicermati dari cakupan kemampuan wilayah belumlah maksimal, karena pelestarian burung ini baru dapat dilakukan di 3 (tiga) wilayah padukuhan, yaitu: Gunung Kelir, Kembang dan Banyunganti. Padahal di wilayah Kalurahan Jatimulyo ini terdapat 12 (duabelas) padukuhan. Berdasarkan hasil penghitungan secara kasar dari KTH Wana

Paksi, sejak giat dilaksanakan konservasi burung dari tahun 2016 hingga 2022 ini, diperoleh nilai finansial di 3 (tiga) padukuhan tersebut tidak kurang dari Rp60.000.000,-. Dengan demikian apabila diasumsikan pelestarian burung sudah mencakup di semua wilayah padukuhan maka akan diperoleh nilai:  $Rp60.000.000 \times 4 = Rp240.000.000,-$ . Selain itu untuk pengembangan secara finansial yang berkaitan dengan keberadaan spesies burung yang semakin lengkap tersebut dapat pula dikembangkan potensi ekowisata pengamatan burung, yang tentu saja hal ini dapat pula diukur dan mendatangkan potensi secara finansial. Memang sudah mulai dilakukan dan ditawarkan oleh komunitas maupun relawan KTH, namun sifatnya masih temporer atau belum dibakukan bentuk serta mekanismenya.

## 2. Potensi Wisata

Kalurahan Jatimulyo merupakan kalurahan di Perbukitan Menoreh yang banyak menyimpan potensi wisata, terutama wisata alam yang juga didukung dengan wisata budaya. Oleh sebab itu tidaklah terlalu berlebihan jika Kalurahan Jatimulyo juga mendapat sebutan sebagai desa wisata budaya. Dengan demikian maka jika dilihat dari karakteristiknya, terdapat minimal 2 (dua) karakteristik yaitu wisata budaya dan wisata alam. Wisata budaya yang sekaligus menjadi ikon Kalurahan Jatimulyo adalah wisata Goa Kiskendo, yang di dalamnya menyajikan pementasan-pementasan budaya tentang cerita pewayangan yaitu kisah Sugiwo-Subali, yang pelaksanaannya selama ini masih bersifat temporer. Sebelum tahun 2018, destinasi wisata Goa Kiskendo ini dikelola oleh warga masyarakat Kalurahan Jatimulyo, namun sejak tahun 2018 pengelolaan diambil alih atau diakuisisi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Sejak saat itu pula pementasan budaya berubah nama menjadi Pementasan Maheswara, meskipun inti cerita yang disajikan tetaplah sama. Selain wisata budaya, di Kalurahan Jatimulyo sebenarnya lebih didominasi oleh wisata alam, yang berupa wisata air dan saat ini terus berkembang, seperti obyek wisata Sungai Mudal, Kedung Pedhut, Kembang Soka, Curug Kuncung Mas, *rest area* Kebun Tebu Gendu dan beberapa destinasi wisata lainnya. Untuk melihat sebaran destinasi obyek wisata di Kalurahan Jatimulyo dapat dilihat pada Gambar 6.



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, data dimodifikasi, 2023

**Gambar 6** Peta Sebaran Potensi Wisata Kalurahan Jatimulyo.

Dari sudut pandang perekonomian, keberadaan obyek-obyek wisata tersebut tentu dapat diorientasikan untuk mendatangkan pendapatan, baik masyarakat maupun pemerintah kalurahan. Untuk melihat peluang ekonomi dari sektor pariwisata di Kalurahan Jatimulyo perlu diukur potensi pendapatan dari beberapa destinasi obyek wisata unggulan sebagai berikut.

#### a. Goa Kiskendo

Obyek wisata Goa Kiskendo yang sejak tahun 2018 dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo setiap bulannya mampu menarik pengunjung rata-rata sejumlah 4.000 hingga 5.000 orang. Harga retribusi tanda masuk saat ini dipatok senilai Rp6.000,- dengan demikian maka jika dikalkulasikan dengan jumlah minimal pengunjung akan diperoleh penghasilan sebesar  $= 4.000 \times \text{Rp}6.000,- = \text{Rp}24.000.000,-$  (dua puluh empat juta rupiah) per bulan. Untuk pendapatan lain-lain seperti parkir misalnya, tarif yang diberikan untuk kendaraan roda 2 adalah Rp2.000,- dan untuk  $\geq$  roda 4 adalah Rp5.000,-. Apabila kunjungan wisata tersebut diasumsikan pengendara kendaraan roda

2 sebanyak 3.000 orang maka pendapatan yang diperoleh adalah  $= \text{Rp}2.000,- \times 1.500 \text{ kendaraan} = \text{Rp}3.000.000,-$  dan kendaraan roda 4 misal 100 kendaraan maka pendapatan yang diperoleh adalah  $\text{Rp}5.000 \times 100 \text{ kendaraan} = \text{Rp}500.000,-$ . Dengan demikian jika semua potensi pendapatan (kotor) tersebut dikalkulasikan maka paling tidak potensi pendapatan yang dapat diperoleh per bulan adalah  $= \text{Rp}27.500.000,-$  (dua puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah. Angka ini belum terhitung dari *multiplier effect* yang dihasilkan dari rumah makan, persewaan kamar mandi, penjualan *souvenir* dan lain-lain.

#### b. Sungai Mudal

Destinasi obyek wisata Sungai Mudal ini sedang menjadi primadona tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung di wilayah Kalurahan Jatimulyo. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu pengelola, rata-rata kunjungan wisatawan berjumlah sekitar 4.000 orang per bulan dengan harga retribusi tanda masuk sebesar Rp10.000,-. Dari angka tersebut jika dikalkulasikan maka pendapatan dari sektor retribusi saja menghasilkan nilai sebesar: Rp10.000,-



$X 4.000 = \text{Rp}40.000.000$ . Belum lagi pendapatan yang diperoleh dari parkir kendaraan bermotor, di mana tarif parkir di lokasi ini adalah  $\text{Rp}2.000,-$  untuk kendaraan roda 2 dan  $\text{Rp}3.000,-$  untuk roda 4. Jika dikalkulasikan pendapatan parkir dengan asumsi pengunjung 3.000 orang menggunakan roda 2 maka diperoleh pendapatan sebesar  $\text{Rp}2.000,- \times 1.500 = \text{Rp}3.000.000,-$  dan asumsi kendaraan pengunjung yang dengan roda 4 sebanyak 100 kendaraan, maka diperoleh pendapatan sebesar  $\text{Rp}3.000,- \times 100 = \text{Rp}300.000,-$ . Total dari pendapatan dari retribusi dan parkir potensial dapat diperoleh sebesar  $\text{Rp}43.300.000,-$  per bulan. Angka ini juga sama halnya dengan obyek wisata yang lain, yaitu belum menghitung potensi ekonomi sebagai bagian dari *multiplier effect*, seperti dari rumah makan, penjualan *souvenir* dan lain-lain.

c. Kedung Pedhut

Obyek wisata Kedung Pedhut ini juga merupakan destinasi obyek wisata air, akan tetapi belum seramai obyek wisata Sungai Mudal. Berdasarkan informasi dari pengelola obyek wisata diperoleh data jumlah pengunjung rata-rata per bulan sebanyak 1.500 orang. Harga tiket retribusi tanda masuk untuk obyek wisata ini adalah  $\text{Rp}11.000,-$  dan rencana pada bulan Juli 2023 ini mengalami perubahan, di mana harga retribusi menyesuaikan hari, yaitu di hari biasa retribusi seharga  $\text{Rp}10.000,-$  dan hari libur menjadi  $\text{Rp}20.000,-$ . Jika menggunakan asumsi harga retribusi tiket yang lama, maka potensi pendapatan yang mampu dihasilkan adalah sebesar  $\text{Rp}11.000 \times 1.500 = \text{Rp}16.500.000,-$ . Apabila ditambah dengan pendapatan dari tarif parkir, yaitu sebesar  $\text{Rp}2.000,-$  untuk roda 2 dan  $\text{Rp}10.000,-$  untuk roda 4 maka dengan menggunakan asumsi 1.000 kendaraan roda 2 diperoleh pendapatan sebesar  $\text{Rp}2.000.000,-$  dan untuk roda 4 diasumsikan 50 kendaraan, diperoleh pendapatan sebesar  $\text{Rp}500.000,-$ . Pendapatan terkait dengan fungsi obyek secara langsung masih ada lagi, yaitu persewaan pelampung dengan sewa 1 pelampung =  $\text{Rp}10.000,-$  dan sewa loker  $\text{Rp}10.000,-$ . Apabila dalam 1 minggu saja 50 pelampung disewa maka dalam 1 minggu dapat diperoleh pendapatan sebesar  $\text{Rp}500.000,-$ , sehingga sebulan menjadi  $\text{Rp}2.000.000,-$ . Dari sewa loker jika kita gunakan asumsi yang sama maka juga akan diperoleh pendapatan sebesar  $\text{Rp}2.000.000$  per bulan. Oleh sebab itu, selain dari pendapatan yang belum

terhitung sebagai akibat dari *multiplier effect* tersebut, secara potensial obyek wisata Kedung Pedhut ini per bulan mampu menghasilkan total pendapatan sebesar  $\text{Rp}22.500.000,-$ .

d. Rest Area Ngares/Kebun Tebu Gendu

Agak berbeda dengan destinasi obyek wisata yang telah disajikan di atas, bahwa untuk *rest area* Ngares ini sifat sebenarnya bukan tempat yang diorientasikan untuk wisata namun lebih diarahkan untuk tempat peristirahatan bagi kendaraan yang melalui jalur Perbukitan Menoreh. Namun demikian, ternyata *rest area* Ngares inipun mampu juga menghasilkan pendapatan yang cukup potensial. Menurut beberapa pengunjung karena lokasi obyek yang mempunyai pemandangan cukup bagus, sehingga seringkali lokasi ini menjadikan tempat yang akan kembali dikunjungi, minimal untuk swafoto. Begitu baik respon dari pelaku perjalanan yang beristirahat di lokasi tersebut, pada akhirnya dapat digali sumber pendapatan yang saat ini sudah berjalan, yaitu parkir kendaraan. Untuk tarif parkir kendaraan roda 2 adalah sebesar  $\text{Rp}2.000,-$  dan rata-rata per bulan pelaku perjalanan maupun pengunjung adalah sebanyak 800 kendaraan, sehingga total pendapatan yang dihasilkan adalah:  $\text{Rp}2.000,- \times 800 = 1.600.000,-$ . Untuk kendaraan roda 4 tarif parkir adalah sebesar  $\text{Rp}5.000,-$  dengan rata-rata per bulan pelaku perjalanan adalah sekitar 300. Jika dikalkulasikan maka pendapatan dari parkir kendaraan roda 4 adalah sebesar  $\text{Rp}5.000,- \times 300 = \text{Rp}1.500.000,-$ . Dengan demikian, hanya sebagai fungsi *rest area* saja mampu per bulan diperoleh rata-rata pendapatan sebesar  $\text{Rp}3.100.000,-$ . Tentu saja nilai tersebut juga belum termasuk *multiplier effect* dari pendapatan lain-lain.

Dari 4 destinasi obyek wisata di Kalurahan Jatimulyo, dapat diestimasi potensi pendapatan dari sektor pariwisata sebesar  $\text{Rp}96.400.000,-$  (sembilapuluh enam juta empat ratus ribu rupiah), padahal jika kita mencermati sebenarnya masih banyak destinasi obyek wisata yang lain yang belum masuk di dalam kalkulasi potensi pendapatan dari sektor pariwisata ini, seperti: Obyek Wisata Kembang Soka, Curug Kuncung Mas, Curug Setawing, Gunung Lanang, Air Terjun Grojogan Sewu, Kedung Banteng dan beberapa destinasi obyek wisata baru lainnya. Apabila seluruh potensi



destinasi obyek wisata dikalkulasikan besarnya pendapatan yang diperoleh maka kemungkinan/ diperkirakan lebih dari Rp250.000.000,- dapat diperoleh dari sektor pariwisata ini. Berdasarkan informasi tambahan dari Pengurus Karang Taruna, jika menggunakan penghitungan kasar maka 60% dari pendapatan di sektor pariwisata ini sebenarnya masuk ke masyarakat. Dengan demikian berarti 60% dari total pendapatan di sektor pariwisata ini dapat dinikmati oleh masyarakat atau warga Kalurahan Jatimulyo. Keunggulan dari banyaknya destinasi obyek wisata alam ini merupakan keunggulan

komparatif dari Kalurahan Jatimulyo. Inilah unggulan yang sejalan dengan pendapat Saragih (2018), yang menyatakan bahwa daya saing sangat tergantung pada kreasi serta inovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam guna menghasilkan produk berupa jasa yang bersifat unik dan tidak ada di lokasi lainnya.

Dari hasil analisis berbagai macam usaha yang terkait dengan perekonomian di Kalurahan Jatimulyo, jika disajikan dalam wujud informasi ringkas dapat dilihat pada tabulasi usaha sebagaimana Tabel 9.

**Tabel 9** Potensi Usaha di Kalurahan Jatimulyo

Usaha Pertanian	UMKM	Konservasi Burung	Wisata	Peternakan
Pertanian lahan basah sangat minim luasannya, yaitu hanya 7,5 ha dan itupun bukan sawah irigasi teknis. Oleh sebab itu peluang usaha dirasa tidak potensial	Bentuk usaha maupun volume produksi masih bersifat temporer, sehingga dirasa belum potensial	Konservasi Burung dirasa cukup potensial jika diukur secara ekonomi. Hal itu dapat ditunjukkan dari kegiatan konservasi burung yang baru dilakukan di 3 padukuhan saja telah menghasilkan estimasi nilai ekonomi sebesar Rp60.000.000,-	Dari sektor usaha wisata mempunyai potensi yang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan pengukuran ekonomi secara sampling untuk 4 destinasi wisata saja telah diperoleh estimasi nilai ekonomis sebesar Rp96.400.000,- per bulan, padahal destinasi wisata alam di Kalurahan Jatimulyo terdapat lebih dari 10 destinasi.	Atas dasar penghitungan secara riil, usaha peternakan Kambing peranakan etawa dirasa paling potensial di antara jenis usaha yang lain. Nilai ekonomis rata-rata pendapatan per keluarga terhitung bersih sebesar Rp2.400.000,- per bulan. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan UMK 2023 yang berlaku di Kabupaten Kulon Progo dengan besaran Rp2.050.447,15

Sumber: Analisis Data Primer, 2023.

## E. Analisis Potensi Kebijakan Penataan Akses

Untuk mengetahui potensi terkait dengan kebijakan penataan akses, maka menjadi penting terlebih dahulu mengetahui status kepemilikan serta besaran luasan penguasaan pemilikan tanah yang ada di Kalurahan Jatimulyo. Berdasarkan informasi dari pejabat kalurahan yang dalam hal ini Pejabat Jogoboyo, diperoleh informasi bahwa di Kalurahan Jatimulyo, diestimasi sejumlah 85% bidang tanah sudah bersertipikat, baik dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak pakai maupun tanah wakaf. Jika data tersebut dikompilasikan dengan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, diperoleh data jumlah nominal bidang tanah yang sudah bersertipikat di Kalurahan Jatimulyo sebanyak 6.919. Dari jumlah nominal tersebut diperoleh pula jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat dengan status hak milik sejumlah 6.766 bidang, atau 98 % dari total seluruh bidang tanah yang bersertipikat. Dengan demikian jika melihat peluang masyarakat untuk mengagunkan sertipikat hak atas tanahnya cukup besar. Hal ini

dapat diketahui dari besarnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat dengan status hak milik sebagaimana data di atas.

Selain dari perspektif jumlah bidang tanah yang bersertipikat, khususnya dengan status hak milik, dapat pula diketahui potensi dari besaran nilai agunan jika mengacu pada salah satu parameter nilai, yaitu luasan. Berdasarkan data penggunaan tanah sebagaimana pada Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa luas penggunaan tanah untuk nonpertanian adalah seluas 345,68 ha yang terdiri atas permukiman dan aset publik. Jika dikurangi dengan luasan aset publik sebesar 54,75 ha maka luas permukiman adalah 290,93 ha. Untuk penggunaan tanah pertanian dalam arti luas, di mana di dalamnya termasuk perkebunan, tegalan, ladang dan semak belukar, luasannya mencapai 1.283,32 ha di mana di dalamnya terdapat tanah dengan status *Sultan Ground* seluas 24,52 ha. Jika luasan tanah pertanian ini dikurangi dengan tanah-tanah dengan status *Sultan Ground* seluas 24,51 ha maka luas tanah pertanian menjadi 1.258,81 ha. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tanah yang benar-

benar dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat untuk nonpertanian adalah seluas 290,93 ha ditambah pertanian seluas 1.258,81 ha maka total seluasannya menjadi 1.549,74 ha. Angka total di atas akan semakin jelas jika direratakan penguasaan pemilikan tanah dengan cara membagi dengan jumlah kepala keluarga. Untuk tanah nonpertanian yang luasannya 290,93 ha tersebut jika dibagi dengan jumlah kepala keluarga di Kalurahan Jatimulyo yang berjumlah 2.571 maka rata-rata 1 kepala keluarga menguasai tanah nonpertanian seluas kurang lebih 1.150 m<sup>2</sup> dan jika luas tanah pertanian juga dibagi dengan jumlah kepala keluarga, yaitu 1258,81 dibagi 2.571 maka setiap kepala keluarga rata-rata menguasai tanah seluas 4.850 m<sup>2</sup>. Dengan demikian jika dikalkulasi total maka diestimasi secara rata-rata setiap kepala keluarga menguasai tanah nonpertanian dan pertanian diperoleh besaran penguasaan tanah sebesar 1.150 + 4.850 = 6.000 m<sup>2</sup>. Secara luasan jika diukur dengan asumsi nilai maka tanah seluas 6.000 m<sup>2</sup> tersebut dapat memiliki nilai yang relatif tinggi.

Dari hasil analisis di atas, hal yang menjadi catatan penting terkait dengan kegiatan penataan akses adalah menemukan terlebih dahulu potensi wilayah secara lebih komprehensif, baik dari aspek demografi ataupun kependudukan sebagai subyek, serta aspek fisik geografis wilayah dan nonfisik geografis wilayah sebagai obyek sebelum dilaksanakan kegiatan. Harapannya jika penataan akses dilaksanakan dengan mengacu pada kesesuaian atau linieritas antara subyek dan obyek maka peluang keberhasilannya dirasa akan lebih besar, mengingat penataan akses tersebut dilakukan adalah berdasarkan data, bukan berdasarkan atas pilihan program sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain program akan lahir jika sudah mengetahui fakta dan data terkait potensi subyek maupun obyek yang akan menerima program penataan akses.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyajian data yang kemudian dilakukan analisis potensi secara ekonomi dalam kaitannya dengan peluang penataan akses maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Potensi usaha dari perspektif ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di Kalurahan Jatimulyo adalah usaha peternakan khususnya kambing peranakan etawa dan pengelolaan sumber daya alam untuk destinasi wisata maupun konservasi lingkungan.

2. Untuk usaha dalam wujud UMKM dirasa masih perlu waktu guna pengembangannya. Hal tersebut terkait dengan masih perlunya pelatihan, pendampingan, pemasaran serta pengembangan produk. Namun segala bentuk kebutuhan untuk pengembangannya dirasa belum diperlukan usaha permodalan dalam wujud kredit perbankan, mengingat pendanaan untuk berbagai keperluan tersebut masih didukung dari dana pendapatan kalurahan.
3. Untuk pengembangan usaha sektor pertanian dalam arti luas, perlu pertimbangan yang matang serta sinergisitas dengan usaha konservasi yang telah dilakukan guna menghindari kerusakan lingkungan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kalurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5).
- Fatimah. (2015). Reforma agraria dalam konteks peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia. *Samudra Keadilan*, 10(2).
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN.
- Limbong, B. (2012). *Reforma agraria*. Margaretha Pustaka.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2023). *Prosiding Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi- Sanksi 2023*.
- Saragih, J. R. (2018). *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sutaryono, Pinuji, S., & Wahyuni. (2019). *Penataan*

*Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Reforma agraria di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.*

- Trisnaningsih. (2016). *Demografi*. Media Akademi.
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma agraria untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2).
- Wibowo, A. (2019). Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.317>
- Wijaya, F. (2000). *Ekonomika Makro-Seri PengantarEkonomika*. BPFP.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma agraria. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 364/KEP/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Desa. (2014). Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (2022). Angka Beban Tanggungan, diakses dari <https://www.bps.go.id/index.php/istilah/24>
- Badan Pusat Statistik (2022). Kulon Progo Dalam Angka Tahun 2022, diakses dari <https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/download.html?>
- Badan Pusat Statistik (2023). Kulon Progo Dalam Angka Tahun 2023, diakses dari <https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/download.html?>
- Badan Pusat Statistik (2023). Kapanewon Girimulyo Dalam Angka Tahun 2022, diakses dari <https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/download.html?>